



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUCHAMAD RACHMAT ROGIANTO, S.T., M.T.**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRA SONI**

Jabatan : **GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang, 28 Oktober 2025



Pihak Pertama,

MUCHAMAD RACHMAT ROGIANTO, S.T., M.T.
NIP. 19710720 200212 1 004

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.540.000	PAPBD
4.1.02	Retribusi Daerah	6.540.000	PAPBD
	JUMLAH	6.540.000	

BELANJA DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	520.244.504.386	PAPBD
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.334.492.399	PAPBD
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	37.985.888.709	PAPBD
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	43.739.904.557	PAPBD
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	406.084.192.721	PAPBD
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.026.000	PAPBD
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	468.700.000	PAPBD
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	84.350.000	PAPBD
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	184.350.000	PAPBD
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000	PAPBD
	JUMLAH	520.713.204.386	

GUBERNUR BANTEN,

**ANDRA SONI**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN,**MUCHAMAD RACHMAT ROGIANTO, S.T., M.T.**
NIP. 19710720 200212 1 004

**SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

DPPA TA-2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persen	65,72
2	Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	Persen	2,33
3	Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Persen	100
4	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	Persen	100



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAGUS HADIYANTO, ST, MM**

Jabatan : **Pit. KEPALA BIDANG PERMUKIMAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 29 Oktobe 2025

Pihak Kedua,


M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Pihak Pertama,


BAGUS HADIYANTO, ST, MM
NIP. 19781017 200902 1 001

**SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

DPPA TA-2025

No	Sasaran Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program Dan Kegiatan)	Satuan	Target
1	Sasaran Program: Meningkatnya sarana dan prasarana kawasan permukiman yang layak	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Hektar	64,89 Ha
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Ketercapaian kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	Persen	100
2	Sasaran Program: Optimalisasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum dipermukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Persen	97,24%
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Ketercapaian kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persen	100

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN D ASAR	520.693.194.386
1.04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	520.693.194.386
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	43.759.904.557
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	864.192,000
1.04.03.1.01.008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	147.349.000
1.04.03.1.01.0012	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	75.000.000

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.04.03.1.01.0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	170.839.000
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	324.913.000
1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	146.091.000
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	42.875.712.557
1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	14.766.680.800
1.04.03.1.02.0010	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	28.109.031.757
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	406.084.192.721
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	406.084.192.721
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2.134.416.000
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi	403.773.144.221
1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	176.632.500

Serang, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua,



M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Pihak Pertama,



BAGUS HADIYANTO, ST, MM
NIP. 19781017 200902 1 001

Daftar Data

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/INDIKAT OR PROGRAM/KEGIATAN	KODE	DAFTAR DATA
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
		1.04.03.1.01.0008	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisas
		1.04.03.1.01.0012	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		1.04.03.1.01.0014	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina
		1.04.03.1.01.0017	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
		1.04.03.1.01.0018	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
		1.04.03.1.02.0003	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki
		1.04.03.1.02.0013	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan

1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS		
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		
		1.04.05.1.01.01	Jumlah Dokumen Perencana Penyediaan PSU Permukiman
		1.04.05.1.01.02	Jumlah Lokasi Permukiman Yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman
		1.04.05.1.01.03	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RINTO YUWONO, ST, MM**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua,

M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Pihak Pertama,

RINTO YUWONO, ST, MM
NIP. 19691017 199703 1 004

**SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

DPPA TA-2025

No	Sasaran Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program Dan Kegiatan)	Satuan	Target
1	Sasaran Program: Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya seluruh dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya seluruh administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya seluruh Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya seluruh Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya seluruh laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: tersusunnya seluruh laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase tersusunnya laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	520.224.494.386
1.04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	520.224.494.386
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.314.482.399
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.652.720.000
1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.800.000
1.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000
1.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000
1.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000
1.04.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000
1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000
1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	420.000.000
1.04.01.1.01.08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	850.000.000
1.04.01.1.01.09	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	111.400.000
1.04.01.1.01.10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1.014.520.000
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.507.725.750
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.297.600.000
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	569.960.000
1.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	340.203.750
1.04.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000

Daftar Data

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KODE	DAFTAR DATA
2	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		
		2.10.03.1.01.01	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		2.10.06.1.01.02	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		2.10.06.1.01.03	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		2.10.10.1.01.01	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi
		2.10.10.1.01.02	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.430.000
1.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000
1.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	189.532.000
1.04.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	225.332.500
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	420.665.500
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.674.039.429
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.924.225.000
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.728.673.720
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.181.110.500

Serang, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua,

M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Pihak Pertama,

RINTO YUWONO, ST, MM
NIP. 19691017 199703 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUHADI, ST, MMT**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERUMAHAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Serang, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua,



M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Pihak Pertama,


SUHADI, ST, MMT
NIP. 19690403 200112 1 004

**SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

DPPA TA-2025

No	Sasaran Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program Dan Kegiatan)	Satuan	Target
1	Sasaran Program: Optimalnya penyediaan rumah bagi korban bencana dan terdampak relokasi program Provinsi	Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi	Persen	75
		Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi	Persen	81,17
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persen	100
2	Sasaran Program: Optimalnya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persen	100

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	520.693.194.386
1.04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	520.693.194.386
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	32.885.888.709
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.605.925.000
1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	240.870.000
1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	240.392.000
1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	249.740.000
1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	240.144.000
1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	249.416.000
1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	185.363.000
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	200.000.000
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	531.195.000
1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencan	76.000.000
1.04.02.1.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	331.445.000
1.04.02.1.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	123.750.000
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	35.731.490.709
1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3.009.650.609
1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	19.169.420.000
1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	13.552.420.100

1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	117.278.000
1.04.02.1.04.0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	67.138.000
1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	50.140.000
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.026.000
1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	100.026.000
1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	100.026.000

Serang, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua,



M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Pihak Pertama,



SUHADI, ST, MMT
NIP. 19690403 200112 1 004

Daftar Data

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KODE	DAFTAR DATA
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
		1.04.02.1.01.0002	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
		1.04.02.1.01.0003	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
		1.04.02.1.01.0006	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus
		1.04.02.1.01.0008	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi
		1.04.02.1.01.0009	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah
		1.04.02.1.01.0010	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
		1.04.02.1.01.0011	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
		1.04.02.1.02.0001	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
		1.04.02.1.02.0004	Tertaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator

		1.04.02.1.02.0006	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
		1.04.02.1.03.0001	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
		1.04.02.1.03.04	Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
		1.04.02.1.03.05	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Provinsi
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
		1.04.02.1.04.0003	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
		1.04.02.1.04.0004	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		
		1.04.06.1.01.0001	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **R. NUGRAHA DANANJAYA, ST**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERTANAHAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua,


M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Pihak Pertama,


R. NUGRAHA DANANJAYA, ST
NIP. 19730103 200112 1 002

**SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

DPPA TA-2025

No	Sasaran Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program Dan Kegiatan)	Satuan	Target
1	Sasaran Program: Optimalisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah	Persen	100
2	Sasaran Program: Optimalisasi redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persen	100
3	Sasaran Program: Optimalisasi penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pendukung perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Persen	100

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	468.700.000
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	468.700.000
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	84.350.000

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	84.350.000
2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	84.350.000
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	184.350.000
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	184.350.000
2.10.06.1.01.02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	84.350.000
2.10.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000
2.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100.000.000
2.10.10.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	100.000.000

Serang, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua,



M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Pihak Pertama,


R. NUGRAHA DANANJAYA, ST
NIP. 19730103 200112 1 002

Daftar Data

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KODE	DAFTAR DATA
2	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		
		2.10.03.1.01.01	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		2.10.06.1.01.02	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		2.10.06.1.01.03	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		2.10.10.1.01.01	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi
		2.10.10.1.01.02	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MEZFI INDRIANI, ST**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RINTO YUWONO, ST, MM**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua,

RINTO YUWONO, ST, MM
NIP. 19691017 199703 1 004

Pihak Pertama,

MEZFI INDRIANI, ST
NIP. 19751003 201001 2 003

**SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN****DPPA TA-2025**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Korodinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	3
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4
4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2
6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	7
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	93
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
21	Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	392
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Kendaraan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	71

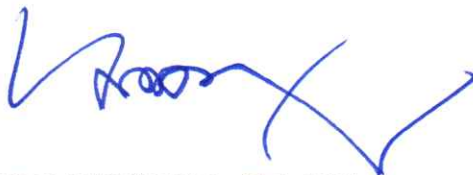
BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	520.693.194.386
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	520.693.194.386
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.314.482.399
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	225.332.500
1.04.01.1.03.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	120.000.000
1.04.01.1.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	105.332.500
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	420.665.500
1.04.01.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	187.625.500
1.04.01.1.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000
1.04.01.1.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	112.627.000
1.04.01.1.05.5	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai	37.373.000
1.04.01.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.040.000
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.674.039.429
1.04.01.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000
1.04.01.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	661.596.036
1.04.01.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000
1.04.01.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.001.964
1.04.01.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000
1.04.01.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.218.000
1.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	230.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.192.223.429
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.924.225.000
1.04.01.1.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.924.225.000
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.728.673.720
1.04.01.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.000.000
1.04.01.1.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000
1.04.01.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.128.673.720
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.181.110.500
1.04.01.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas	186.025.000
1.04.01.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.280.000.000
1.04.01.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	490.085.500
1.04.01.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.225.000.000

Serang, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua,



RINTO YUWONO, ST, MM
NIP. 19691017 199703 1 004

Pihak Pertama,



MEZFI INDRIANI, ST
NIP. 19751003 201001 2 003

Daftar Data

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KODE	DAFTAR DATA
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
		1.04.01.1.03.3	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
		1.04.01.1.03.6	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		1.04.01.1.05.2	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		1.04.01.1.05.3	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		1.04.01.1.05.4	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
		1.04.01.1.05.5	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		1.04.01.1.05.9	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		1.04.01.1.06.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		1.04.01.1.06.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		1.04.01.1.06.4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		1.04.01.1.06.5	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
		1.04.01.1.06.6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
		1.04.01.1.06.9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		1.04.01.1.06.10	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		1.04.01.1.06.11	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		1.04.01.1.07.3	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
		1.04.01.1.07.6	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		1.04.01.1.08.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang Disediakan

		1.04.01.1.08.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		1.04.01.1.08.4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		1.04.01.1.09.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
		1.04.01.1.09.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		1.04.01.1.09.6	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
		1.04.01.1.09.9	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya